

# PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL

(Studi Empiris Pada Kabupaten Se Karesidenan Pati Tahun 2010-2016)

*Pungky Puspita Sari<sup>1</sup>, Febra Robiyanto<sup>2</sup>*

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus*

*[kyky.pungkypspt@gmail.com](mailto:kyky.pungkypspt@gmail.com)*

*[febra.robiyanto@umk.ac.id](mailto:febra.robiyanto@umk.ac.id)*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten Se-Karisidenan Pati Tahun 2010-2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 Kabupaten Se-Karisidenan Pati pada Tahun 2010-2016 yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah (APBD) dan Badan Pusat Statistik. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan mengambil seluruh populasi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisiensi determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sedangkan Dana Aloksi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal

## I PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah, termasuk didalamnya desentralisasi fiskal diharapkan untuk terjadinya peningkatan pada sektor publik. Dengan terjadinya peningkatan pada pelayanan publik ini, yang mana akan menarik perhatian daripada para investor untuk membuka usaha daerah. Peningkatan pada pelayanan publik tidak lepas dari pengalokasian dari rancangan APBD daerah itu sendiri, yang mana dalam hal ini termasuk pada pengalokasian anggaran belanja modal. Pengalokasian anggaran belanja modal termasuk pengalokasian yang paling kecil dibandingkan pengalokasian untuk belanja yang lain. Pengalokasian anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang termasuk untuk kelancaran pelaksanaan dari tugas pemerintah maupun untuk kepentingan dari fasilitas publik. Anggaran belanja modal juga dipengaruhi oleh jumlah dari pendapatan daerah. Apabila

pendapatan daerah tidak mencukupi maka pengalokasian dari pendapatan daerah diprioritaskan untuk belanja daerah yang dianggap penting (suhendra,dkk ;2015). Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari internal daerah tetapi juga berasal dari faktor eksternal daerah. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### *Agency Teory*

Jensen dan Mecking (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih antara

Pemerintah Daerah (*agent*) dengan Pemerintah Daerah (*principal*). Pemdes (agen) diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintah atas nama prinsipal. Teori keagenan menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemdes sebagai prinsipal dan pemdes sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Agen dikontrak melalui tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan dana kepada agen. Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa prinsipal menyerahkan wewenang kepada agen dalam mengurus masyarakat.

### **Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

### **Pendapatan Asli Daerah**

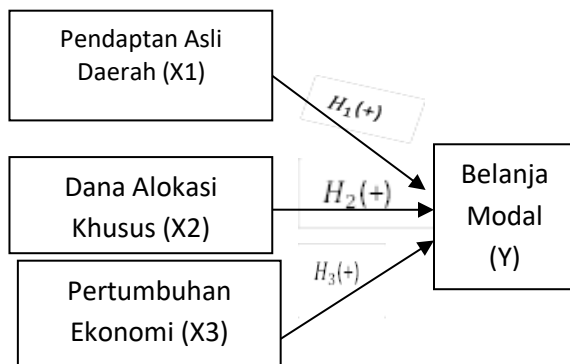
Menurut Halim (2004; 67) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu:“ Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah , Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan,yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengalokasian kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

### Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan-pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. DAK diukur dari jumlah penerimaan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat Maryati dan Endarwati (2010).

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, disini ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (Boediono,2009:1).



### Pengaruh Penapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Menurut Pelealu (2013) memaksimalkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah yang akan membiayai pengeluaran pemerintah daerah lewat belanja modal, akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah yang nantinya akan menambah pendapatan daerah. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Berdasarkan landasan teori diatas maka hipotesisnya adalah sebagai berikut :

$H_1$ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja

### Pengaruh Dana Alokasi Khusus dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Tuasikal (2008) dari hasil penelitiannya menyatakan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik

dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan demikian diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang terealisasi dalam bentuk belanja modal. Hipotesis dari pembahasan diatas adalah :

$H_2$ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal ini yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal. Oleh karena itu:

$H_4$  : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Se Karesidenan Pati dari Tahun 2010-2016. Penelitian ini akan digunakan teknik sampling jenuh atau sensus (Sugiyono, 2015: 67). Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD dan data Badan Pusat Statistik tahun 2010-2016 yang akan diperoleh data mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, dan pengujian ketepatan pemikiran model (Goodness of Fit test) bertujuan untuk menguji tingkat keeratan dan keterkaitan anatr variabel dependen dan variabel independen. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisiensi determinasi, nilai statistik F dan statistik t.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Statistik deskriptif

###### Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Maxim um	Mean	Std. Deviation
PAD	35	24.70	26.34	25.5720	.40400
DAK	35	24.14	25.88	24.9983	.37731
PE	35	.90	1.78	1.5426	.19193
BM	35	24.74	26.74	26.0660	.43984
Valid N (listwise)	35				

##### Uji Normalitas

Data dalam penelitian sebanyak 35 dengan melalui uji *one-sample kolmogorov-smirnov test*. Nilai *asyp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200 , maka data berdistribusi normal dan dapat dilakukan analisis selanjutnya.

Variabel	Test statistic	Sig	$\alpha$	Keterangan
Unstandardized Residual	0,103	0,200	0,05	Normal

diketahui variabel unstandardized residual memiliki test statistic 0,103 dengan sig ( $\rho$  value) 0,200 yang lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

##### Uji Multikolinearitas

Peneliti ini melakukan uji multikolonieritas dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi

multikolinieritas, ditunjukkan dengan nilai *Tolerance*  $\geq 0,10$  dan nilai *VIF*  $\leq 10$  (Ghozali, 2016:103).

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
PAD	0.426	2.349	Bebas multikolinieritas
DAK	0.794	1.259	Bebas multikolinieritas
PE	0.622	1.608	Bebas multikolinieritas

menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Hal ini terlihat dari nilai *tolerance* yang tidak ada kurang dari 0,1, dan nilai *VIF* yang lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *uji glejser*. Dengan asumsi apabila variabel bebas tidak berpengaruh terhadap nilai absolute residual ( $\text{sig} > 0,05$ ) maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Variabel	B	Sig	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	-0.085	0.462	Bebas heteroskedastisitas
Dana Alokasi Umum	0.335	0.077	Bebas heteroskedastisitas
Dana Alokasi Khusus	-0.101	0.271	Bebas heteroskedastisitas

Pertumbuhan Ekonomi	-0.335	0.104	Bebas heteroskedastisitas
<b>Dependet Variabel: AbsRes</b>			

semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap absolute residual, dimana nilai sig dari variabel bebas lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk penelitian ini menggunakan *Runs Test*, dimana dapat dikatakan bebas dari uji autokorelasi apabila nilai signifikan >0,05.

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.171

diketahui bahwa nilai asymp.sig 0,171 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada uji ini tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan pada hasil perhitungan SPSS 23, maka persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,542 + 0,499 X_1 - 0,030 X_2 + 0,177 X_3 + 0,754 X_4 + e$$

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

	R Square	Adjusted R Square
	0.752	0.508

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,508%. Hal ini berarti bahwa sebesar 0,508% variabel belanja modal

dengan tiga variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sisanya sebesar 49,2% dijelaskan oleh variabel lain.

#### Uji Signifikansi Simultan (Uji Nilai F)

	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>	<i>Keterangan</i>
Regression	3.724	4	0.931	9.788	0.000	Signifikan
Residual	2.854	30	0.095			
Total	6.578	34				

Didapati nilai F hitung sebesar 9,788 mempunyai probabilitas (sig) 0,000. Melihat nilai probabilitas (sig) yang kurang dari  $\alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ), hal ini berarti bahwa model penelitian adalah fit atau dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

#### Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Nilai t)

<b>Variabel</b>	<b>B</b>	<b>T</b>	<b>Sig</b>	<b>Keterangan</b>
PAD	0.499	2.486	0.019	Signifikan ( $H_1$ diterima)
DAK	0.177	1.126	0.269	Non signifikan ( $H_3$ ditolak)
PE	0.754	2.158	0.039	Signifikan ( $H_4$ diterima)

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal



Berdasarkan table 4.8 diketahui pendapatan asli daerah memiliki koefisien 0,499 dan t hitung sebesar 2,486 dengan probabilitas (sig) 0,019. Nilai probabilitas (sig) ini kurang 0,05, sehingga dapat disimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan arah positif. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima.

#### 2. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

Berdasarkan table 4.8 diketahui dana alokasi khusus memiliki koefisien 0,177 dan t hitung sebesar 1,126 dengan probabilitas (sig) 0,269. Nilai probabilitas (sig) ini lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan arah positif. Dengan demikian hipotesis tiga ( $H_2$ ) ditolak.

#### 3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

Berdasarkan table 4.8 diketahui pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien 0,754 dan t hitung sebesar 2,158 dengan probabilitas (sig) 0,039. Nilai probabilitas (sig) ini kurang 0,05, sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan arah positif. Dengan demikian hipotesis empat ( $H_3$ ) diterima

### V. KESIMPULAN

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Tingginya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah membuat pemerintah daerah memiliki dana untuk belanja modal tahun mendatang. Hal ini sama dengan penelitian Pratiwi dkk (2016). Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dikarakanakan kecilnya penerimaan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, menyebabkan pemerintah daerah tidak mampu meningkatkan pengalokasian dana untuk belanja modal. Hal ini sama dengan penelitian Suhendra dkk (2015). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa membutuhkan sarana dan prasarana serta infrastruktur untuk meningkatkan perputaran produksi barang dan jasa tersebut, sehingga pemerintah daerah akan meningkatkan alokasi terhadap anggaran belanja modal. Hal ini tidak sama dengan penelitian Arwati dan Hadiati (2013).

## KETERBATASAN

1. Variabel bebas yang dimasukkan hanya mampu mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal sebesar 50,8%, tidak menutup kemungkinan masih ada pengaruh variabel bebas lainnya
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal didasarkan pada pemberian dana pemerintah diserahkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan suatu daerah.

## SARAN

1. Diharapkan bagi peneliti berikutnya agar dapat menambah variabel-variabel lain yang kemungkinan bisa menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal seperti sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan memiliki sisa lebih perhitungan anggaran yang tinggi, pemerintah daerah memiliki dana untuk belanja modal di tahun yang akan datang
2. Menambahkan obyek penelitian tidak hanya satu karesidenan tetapi bisa menjangkau semua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Ardhian Nuarisa, Sheila. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).
- Arwati dan Hadiati Novita, 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat".
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Boediono, 2009. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi ketujuh BPEE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Darwanto dan Yulia Yustika, 2007. "Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan, Asli Daerah, dan Dana Aloksi Umum terhadap belanja modal".

- Devita, dkk. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal prespektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol.2
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Edisi Delapan. Penerbit BPUD: Semarang.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2004; 67). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Jensen, Micahel C., William H. Meckling, 1976, *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, The Journal of Financial Economics*.
- Kasyati. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, dan Kemandirian Fiskal terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.
- Kuncoro dan Mudrajat (2004), otonomi dan pembangunan daerah ,Penerbit Erlangga
- Mangowal, Jessy Christine (2003). Pendapatan Daerah Pengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Propinsi Sulawesi Utara. Manado: Jurnal EMBA Vol. 1, No.4 1386-1396
- Marizka Reza, 2013. Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat (Tahun 2006-2011). Skripsi. Padang: Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Maryati dan Endarwati, 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatra Barat. ISSN 1858-3687 *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol 5 No:68-84
- Mayasari dkk. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Vol: 2 No.1 Tahun 2014
- Oktora dan Pontoh, 2013, Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *JURNAL ACCOUNTABILITY* Vol.2 No.1
- PP No.58 Tahun 2005 Tentang Pengalokasian Keuangan Daerah
- Pratiwi Ajeng, Diana dan Juanaidi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi empiris pada Pemerintahan Kabupaten, Kota Se Malang Raya).

- Priya, Adiwiyana. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Septiadi Suhendra, Sulindawati dan Adiputra. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Pemeliharaan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Bali Periode 2009-2013. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015)*
- Situngkir, 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatra Utara. *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara. Medan
- Syukriy dan Halim Abdul, 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Proceesing Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2013, Surabaya*, hal. 1140
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Wati dan Fajar. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah kota Bandung. *Jurnal kajian Akuntansi Vol.1:63-67*
- Wisnu, Setiawan. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Yogyakarta Tahun 2007-2013. *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.